

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Laporan ini merinci capaian kinerja penanganan inflasi di Kabupaten Bandung selama periode Januari hingga Maret (Triwulan I) tahun 2026. Upaya pengendalian difokuskan pada pemantauan harga, stabilisasi pasokan melalui intervensi pasar, serta penguatan sarana pertanian untuk memastikan ketersediaan komoditas pangan pokok bagi masyarakat. Seluruh kegiatan didanai melalui sumber anggaran APBD Tahun 2026.

Perkembangan Inflasi Kabupaten Bandung pada Triwulan I tahun 2026 dapat dibandingkan dengan yang terjadi pada triwulan I tahun 2025 dimana laju inflasi di Kabupaten Bandung tercatat cukup stabil meskipun dengan kecenderungan berada pada tingkat inflasi batas tertinggi. Inflasi year-on-year (yoy) selama Januari hingga Maret 2025 masing-masing tercatat sebesar 0,39 %, -1,25%, dan 0,85%. Sementara itu, inflasi month-to-month (mtm) menunjukkan pergerakan yang relatif moderat, yakni sebesar 0,06 persen di Januari, naik menjadi 0,31 persen di Februari, dan sedikit melambat menjadi 0,11 persen pada Maret. Pola ini menunjukkan adanya tekanan harga yang konsisten namun terkontrol, mencerminkan kondisi permintaan masyarakat yang stabil serta pasokan barang dan jasa yang relatif terjaga.

Memasuki triwulan I tahun 2026, terjadi perubahan yang cukup mencolok. Inflasi mengalami tren yang relatif lebih stabil dibanding pada tahun 2025 dan tidak terjadi deflasi. Pada Januari 2026, inflasi yoy tercatat hanya sebesar 3,01%, dan meningkat tajam menjadi 4,56% sehingga melampaui target inflasi TPIN, namun kenaikan tersebut tidak berlangsung lama. Pada Maret 2026, inflasi mulai menunjukkan tren **pemulihan**, dengan inflasi yoy turun menjadi 3,41%. Kondisi ini mengindikasikan kembali menguatnya tekanan harga, yang dapat dikaitkan dengan mulai meningkatnya permintaan masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) di Bulan Maret. Permintaan terhadap bahan pangan dan kebutuhan pokok lainnya

biasanya meningkat menjelang bulan Ramadhan, sehingga perlu menjadi perhatian dalam menjaga kestabilan harga dan ketersediaan pasokan.

Secara keseluruhan, triwulan I tahun 2026 menunjukkan dinamika inflasi yang cukup kontras dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun demikian, peningkatan permintaan menjelang HBKN menjadi potensi sumber tekanan inflasi yang perlu diantisipasi sejak dini agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi daerah, khususnya dalam menjaga keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi pangan. Adapun *volatile goods* yang menyumbang inflasi selama Triwulan I 2026 ini adalah beras, tomat, air kemasan, cabai merah, daging ayam ras, bawang putih, telur ayam ras, bawang merah.

Yang menjadi tantangan pada Bulan Maret ini adalah karena memasuki Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri 1447 H, yang berpotensi meningkatkan nilai inflasi yang disebabkan oleh *demand pull inflation* pada komoditas tertentu seperti Daging Ayam Ras, Daging Sapi, Cabai Merah, Bawang Merah dan Beras. Oleh sebab itu TPID Kabupaten Bandung terus melakukan upaya 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif) agar inflasi tetap terkendali dengan memperhatikan data ketersediaan stok kebutuhan pokok masyarakat menjelang idul fitri yang ditunjukkan oleh tabel di bawah ini:

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Upaya stabilisasi nilai inflasi di Kabupaten Bandung menghadapi beberapa tantangan yang menantang, salah satu nya adalah menghadapi HBKN Idul Fitri 1447 H di akhir Bulan Maret Tahun 2026 dimana pasar menghadapi peningkatan permintaan komoditas pangan yang berpotensi meningkatkan nilai inflasi. Oleh karena itu dengan menggunakan Strategi 4K Pengendalian Inflasi daerah pada Triwulan I Tahun 2026 TPID Kabupaten Bandung mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dengan analisis sebagai berikut:

1.1. Ketersediaan pasokan

Permasalahan utama terletak pada karakteristik produksi pangan yang masih sangat bergantung pada musim, terutama untuk komoditas hortikultura. Fluktuasi produksi menyebabkan kondisi surplus pada saat panen dan defisit pada saat paceklik. Di sisi lain, meskipun Kabupaten Bandung merupakan daerah penghasil, tidak seluruh hasil produksi terserap untuk kebutuhan lokal karena sebagian didistribusikan ke luar daerah. Kondisi ini menimbulkan paradoks di mana daerah produsen justru tetap menghadapi risiko kekurangan pasokan pada waktu tertentu. Selain itu, tekanan terhadap petani juga terlihat dari menurunnya nilai tukar petani pada awal tahun akibat turunnya harga jual di tingkat produsen.

1.2. Keterjangkauan harga

Tingginya volatilitas harga pangan menjadi isu utama. Kenaikan harga pada Februari dan Maret 2026 didominasi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, yang menunjukkan bahwa inflasi daerah sangat dipengaruhi oleh komponen volatile food. Selain itu, terdapat fenomena asimetri harga, di mana harga di tingkat konsumen meningkat cukup tinggi, namun tidak selalu diikuti oleh peningkatan harga di tingkat petani. Hal ini mengindikasikan adanya inefisiensi dalam rantai pasok. Kenaikan biaya produksi seperti pupuk, tenaga kerja, dan distribusi juga turut mendorong kenaikan harga, yang pada akhirnya berdampak pada daya beli masyarakat.

1.3. kelancaran distribusi

Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan panjangnya rantai distribusi dan belum optimalnya sistem logistik pangan. Distribusi komoditas masih sangat bergantung pada peran perantara, sehingga memperbesar margin harga antara produsen dan konsumen. Selain itu, meskipun merupakan daerah penghasil, Kabupaten Bandung masih bergantung pada pasokan dari luar daerah untuk komoditas tertentu seperti bawang putih dan sebagian jenis beras. Faktor cuaca dan kondisi infrastruktur juga turut mempengaruhi kelancaran distribusi, terutama pada periode menjelang hari besar keagamaan, sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan pasokan dan kenaikan harga di pasar.

1.4. komunikasi efektif

Tantangan yang muncul adalah belum optimalnya pengelolaan ekspektasi masyarakat terhadap harga pangan. Menjelang Ramadan pada awal Bulan Maret 2026, kecenderungan *panic buying*

sering terjadi dan turut mendorong kenaikan harga pada beberapa komoditas. Kenaikan beberapa komoditas seperti Daging Ayam Ras, Daging Sapi, Cabai, Bawang Merah dan Bawang Putih terjadi di pasar pantauan Kabupaten Bandung akibat kenaikan permintaan.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

TPID Kabupaten Bandung senantiasa berupaya menjaga agar inflasi Kabupaten Bandung tetap stabil pada target rentang inflasi antara 1,5% hingga 3,5% sesuai dengan instruksi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2026. Target tersebut diupayakan melalui upaya Pemda untuk menyeimbangkan permintaan dan penawaran Bahan Pokok (*volatile good*) yang menjadi penyumbang terbesar terhadap tingkat inflasi Kabupaten Bandung dengan strategi 4 K yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Strategi tersebut dituangkan kedalam program kerja yang dilaksanakan oleh anggota teknis Tim TPID Kabupaten Bandung dan tercatat dalam Rencana Aksi Daerah dalam Upaya Penanganan Inflasi Tahun 2026 diantaranya:

Strategi 4K Pengendalian Inflasi

Program Kerja

Keterjangkauan Harga

1. Pelaksanaan Operasi Pasar Murah sebagai Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
2. Gelar pangan murah sebagai program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
3. Mudik Gratis yang dilaksanakan untuk masyarakat Kabupaten Bandung
4. Monitoring dan evaluasi harga dan ketersediaan sebagai program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Ketersediaan Pasokan

1. Melakukan Fasilitasi Lumbung Pangan sebagai program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
2. Fasilitasi Bibit Komoditas rentan inflasi seperti Bawang Merah, Padi dan Cabai Merah
3. Pengembangan budi daya ayam, itik, puyuh petelur, itik pedaging dan sapi perah
4. Pengembangan bawang merah, cabai merah dan sarana prasarana produksi lainnya
5. Monitoring stok bahan pokok penting di pasar pantauan Kabupaten Bandung
6. Melaksanakan pengembangan usaha pangan masyarakat

Kelancaran Distribusi

Melaksanakan monitoring dan pengawasan angkutan barang

Komunikasi Efektif

Melaksanakan koordinasi intens antara Tim TPID Kabupaten Bandung, TPID Provinsi Jawa Barat, ataupun dengan TPIN melalui rapat koordinasi, capacity building maupun konsultasi, monitoring stok bapokting di pasar.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Upaya langkah konkret pengendalian inflasi pada Triwulan I yang dilaksanakan oleh OPD teknis pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

1. Stabilisasi Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok:

1.

o

Telah dilaksanakan 11 kegiatan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung pada Bulan Januari hingga 25 Maret 2026. Penyaluran disalurkan sebanyak 84.255 Kelompok Penerima Manfaat yang tersebar di 31 Kecamatan dengan uraian sebagai berikut:

Kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) di 31 Kecamatan di Kabupaten

- 1.
2. Mudik Gratis untuk masyarakat Kabupaten Bandung dalam rangka menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1447 H Tahun 2026 sehingga menjadi shock absorber terhadap dampak
3. Operasi Pasar Murah yang dilaksanakan Dinas Perdagangan dan
 1. Upaya menjaga Ketersediaan Pasokan Pangan:
 1. Monitoring dan Evaluasi Data Pasokan dan Harga Komoditas Cabai dan Bawang
 2. GPM dilaksanakan di 31 Kecamatan di Kabupaten
 2. Upaya Kelancaran Distribusi Pangan:
 1. Kegiatan Rehabilitasi Bendung

Kegiatan Survey Bendung untuk Kegiatan Rehabilitasi Bendung Irigasi Tahun 2026 dilaksanakan untuk mengidentifikasi kondisi eksisting bangunan bendung irigasi serta menentukan kebutuhan penanganan rehabilitasi guna menjaga fungsi pengambilan dan pengaturan air irigasi.

Hasil survei ini menjadi dasar dalam perencanaan kegiatan rehabilitasi sehingga distribusi air irigasi ke lahan pertanian dapat tetap berjalan optimal. Dalam kaitannya dengan monitoring dan evaluasi (monev) inflasi daerah, kegiatan ini mendukung keberlanjutan layanan irigasi yang berperan penting dalam menjaga stabilitas produksi pertanian dan ketersediaan komoditas pangan yang dilaksanakan di daerah irigasi Leuwinanggung - Kecamatan Ciwidey, Kecamatan Ciparay dan Kecamatan Pacet.

1. Kegiatan Feasibility Study (FE) untuk kegiatan mendesak merupakan survei teknis lapangan yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi secara cepat kondisi bangunan bendung atau jaringan irigasi yang mengalami kerusakan atau gangguan fungsi sehingga memerlukan penanganan segera. Kegiatan ini bertujuan memperoleh data kondisi eksisting sebagai dasar penentuan langkah penanganan yang tepat guna menjaga kelancaran distribusi air irigasi ke lahan. Dalam kaitannya dengan monitoring dan evaluasi (monev) inflasi, penanganan cepat terhadap gangguan infrastruktur irigasi dapat membantu menjaga keberlangsungan produksi pertanian dan ketersediaan komoditas pangan yang dilaksanakan di Desa Mekarjaya Kecamatan Arjasari, Kampung Mekarjaya Kecamatan Ciwidey, Kecamatan Patrohsari, dan RSUD Arjasari Kabupaten Bandung.

1. Upaya Komunikasi Efektif
 1. Melaksanakan Rapat Koordinasi rutin terkait langkah konkret pengendalian inflasi di Kabupaten Bandung yang dilaksanakan secara reguler dengan Kementerian Dalam Negeri RI, Provinsi Jawa Barat, maupun antarinternal TPID Kabupaten Bandung.
 2. Monitoring stok bahan pokok penting di pasar pantauan Kabupaten Bandung dan diinput melalui aplikasi Sibapokting Kabupaten Bandung.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitasnya di rentang 1,5% hingga 3,5% menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri, Tim TPID Kabupaten Bandung dapat mengimplementasikan beberapa strategi:

1. **Pemantauan Pasar:** Tim TPID harus terus memantau kondisi pasar secara cermat,

khususnya terkait dengan kenaikan permintaan bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan. Dengan pemantauan yang cermat, mereka dapat mengantisipasi perubahan-perubahan harga yang signifikan.

2. **Koordinasi** : Memerintahkan anggota TPID untuk melakukan intervensi yang terintegrasi mulai dari *early warning system* terhadap komoditas yang mulai naik hingga intervensi harga melalui **Kios Inflasi Si Pintar Bedas** yang intensif terhadap bahan pokok tersebut;
3. **Stok Cadangan**: Membangun stok cadangan bahan pokok yang cukup di daerah tersebut sebelum memasuki periode peningkatan permintaan dapat membantu mengurangi fluktuasi harga. Hal ini memungkinkan untuk menghadapi lonjakan permintaan tanpa harus mengandalkan impor yang mungkin mengalami keterlambatan atau hambatan
4. **Edukasi Publik bekerja sama dengan pemuka agama**: Melakukan kampanye edukasi oleh Utzad kepada masyarakat agar tidak berlebihan dalam berbelanja barang ataupun jasa mengingat bulan ini adalah momen keagamaan yang tepat dalam HBKN Idul Fitri 1447 H.